



RENCANA KERJA

RENJA 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Keptihan Danurejan Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 581507

Website: www.birotapem.jogjaprov.go.id Email: rotapem@jogjaprov.go.id

Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 00825 / KPTS / III / RO.TAPEM/ 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu Tim Penyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 1312 Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KE DUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengolahan data dan informasi;
 2. menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 3. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 4. merumuskan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah;
 5. merumuskan indikator sasaran, indikator program hingga program kegiatan 2017-2022;
 6. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 7. menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah;
- KE TIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi;
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Maret 2019

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DIY

NOMOR : 00825 / KPTS / III / RO-TAPEM / 2019

TANGGAL : 4 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

No	Jabatan dalam Tim	Nama	NIP
1.	Ketua	Maladi, S.H., M.M.	19630606 199003 1 013
2.	Wakil Ketua	H.E.T. Wahyu Nugroho, S.I.P, M.Si	19741017 199903 1 002
3.	Sekretaris	Rini Sri Wahyuni, SE, MM	19750218 199803 2 002
4.	Anggota	Agustina Pangestujati, SIP	19780822 200501 2 008
5.	Anggota	Drs. Wahyu Krisnadi, M.M.	19661210 198503 1 001
6.	Anggota	Rokhani Yuliyanti, S.H.	19670726 198903 2 007
7.	Anggota	Andriyan Muryanto, S.H.	19800508 201101 1 004
8.	Anggota	Alexander Priyasma, S.I.P.	19840428 201101 1 008
9.	Anggota	Gigusa Ella, S.H.	19870213 201101 1 009
10.	Anggota	Bekti Nurayni, S.Si	19871014 201402 2 002
11.	Anggota	Wahyu Cahyaningsih, SI.P.	19870202 201502 2 002
12.	Anggota	Arrof Fefkhiatin, S.IP	19910208 201502 2 002

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 Maret 2019

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN



MALADI, S.H., M.M.

NIP. 19630606 199003 1 013

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga periode Renstra Tahun 2017-2022 yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2020 terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, program/kegiatan, dana indikatif beserta sumbernya di 2020 dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif di tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2020.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2020 terkait dengan substansi perubahan di bidang tata kelola pemerintahan yang meliputi bidang kelembagaan, analisa jabatan dan ketatalaksanaan serta sejalan dengan tema pembangunan DIY Tahun 2020. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendukung tercapainya misi kedua dari RPJMD DIY 2018-2022 yaitu; **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis**; dimana rumusan misi ini meringkas Panca Mulia 4, dan 5. Dari Misi tersebut, ditetapkanlah tujuan Biro Tata Pemerintahan, yang diharapkan akan tercapai di 2021 nanti yaitu; Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2020 kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk pelaksanaan program kegiatan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2020 nanti. Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerjasama sinergis dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY

Yogyakarta, 28 Juni 2019

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,



ALADI, S.H., M.M.
NIP. 19630606 199003 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	iii	
BAB 1	PENDAHULUAN	1-1
1.1	Latar Belakang.....	1-1
1.2	Landasan Hukum	1-3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	1-5
1.4	Sistematika Penulisan	1-6
BAB 2	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	2-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-40
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-45
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	2-52
BAB 3	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	3-3
3.3	Program dan Kegiatan	3-5
BAB 4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	4-1
BAB 5	PENUTUP	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-2
Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-43
Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-53
Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-55
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	3-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah	2-51
--	------

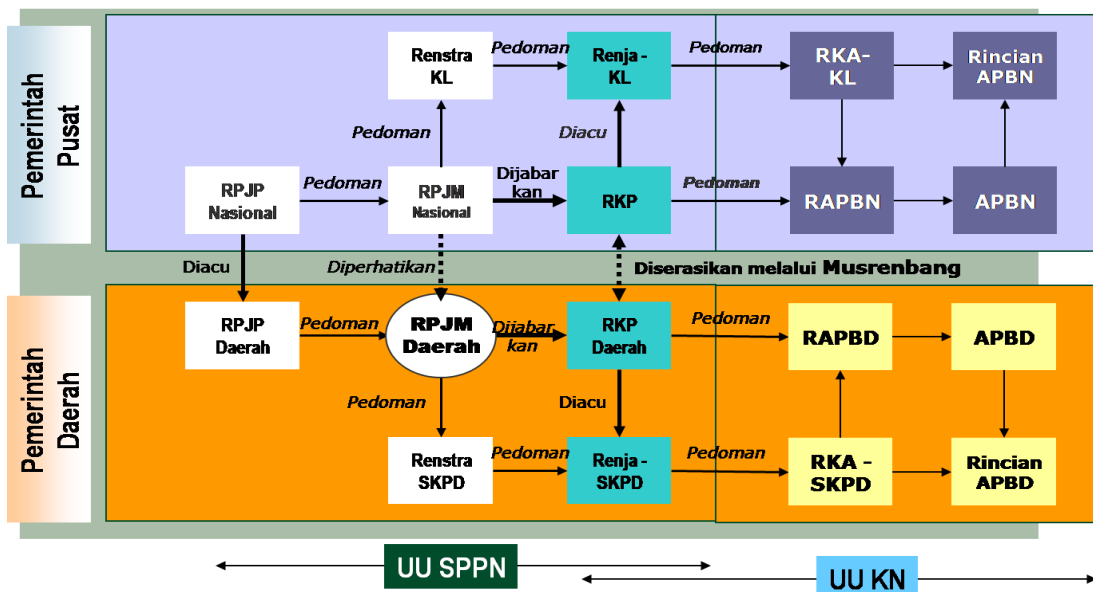
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Alur perencanaan pembangunan kemudian berjalan sinergis dengan alur penganggaran, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pada tingkat perencanaan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional diacu dalam penyusunan RPJP Daerah. RPJP Daerah selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Daerah. RPJM Daerah dan RKP Daerah tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD. Secara ringkas, alur perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 1.1. Alur Perencanaan dan Penganggaran dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



RPJPD DIY Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode kedua dari RPJMD DIY 2017-2022 yang memasuki masa transisional pada tahun 2017 dan tahun pertama tahun 2018.

RKPD DIY Tahun 2020 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan peralihan antara periode RPJMD 2012 – 2017 dan RPJMD 2017 – 2022. Sebagai tahapan tahun kedua RPJMD 2017 – 2022, penyusunan RKPD tahun 2018 dilaksanakan dengan mengakomodir upaya penyesuaian materi awal RPJMD 2017 – 2022 dengan menyesuaikan konten RKPD tahun 2020 dengan dokumen *background study* RPJMD terkait. Penyesuaian ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselarasan RKPD tahun 2020 dengan calon dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dijabarkan.

Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN yang saat ini masih dalam proses penyusunan naskah Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Penyusunan RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD DIY 2018 - 2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dari visi RPJMD DIY 2017-2022 *“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”* pada tahun pembangunan 2019 kemudian dirumuskan dalam pendekatan tematik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2020 mendatang ialah sebagai berikut:

- a. Mengatasi Ketimpangan Wilayah
- b. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
- c. Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan *New Yogyakarta International Airport*
- d. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta

Berkenaan dengan tema pembangunan RKPD DIY 2020 mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sebagai pilihan tema indikatif. Pilihan tema pembangunan yang ada memperhatikan aspek keistimewaan, tema pembangunan nasional dan fokus tematik, serta identifikasi masalah yang telah dibahas pada awal bab dokumen sehingga sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut maka dirumuskan tema RKPD DIY Tahun 2020 sebagai berikut:

“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Tema RKPD DIY Tahun 2020 tersebut memiliki pengarusutamaan pada isu-isu sebagai berikut Ketimpangan Antar Wilayah, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, Dukungan Pembangunan Bandara NYIA, Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah. Untuk itu organisasi perangkat daerah diharapkan merespon tema pembangunan tersebut untuk diperhatikan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020. Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2020 memiliki keterkaitan langsung dengan Rancangan RKPD DIY Tahun 2020. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2020, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY Tahun 2020. Selanjutnya Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2020 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD DIY Tahun 2020 yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Terdapat lima regulasi pada level undang-undang yang mempengaruhi dan membawa konsekuensi untuk implementasi perencanaan dan penganggaran tahun 2020 pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2020 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

2. Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
 15. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Setra Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintsh Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;
 19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

- a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan;
- b. Mengefektifkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan :

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, akuntabel, partisipatif serta selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah DIY.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2020.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2018)

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan Renja, sasaran Renja dan uraian Program dan Kegiatan Renja.

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

Bab ini berisi penutup dari uraian Bab-Bab sebelumnya.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target program-kegiatan pada Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan realisasi pelaksanaan program-kegiatan pada tahun 2018, kemudian memperkirakan realisasi capaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) pada tahun berjalan. Dengan demikian diperoleh informasi mengenai realisasi program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2018. Disamping itu, evaluasi juga dilakukan terhadap keadaan pegawai pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beserta dengan analisis kebutuhan pegawai (data per tanggal 31 Desember tahun 2018), serta keadaan sarana dan prasarana pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun anggaran (TA) 2018.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Tahun 2018

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selanjutnya dipergunakan untuk menentukan program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2018, khususnya program/kegiatan hasil redesain SKPD tahun 2018. Penentuan didasarkan pada kolom 8 atau kolom prosentase Tingkat Realisasi (Realisasi Renja SKPD tahun 2018 dibagi dengan Target Renja SKPD tahun 2018). Berikut disampaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sampai dengan tahun 2018.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4													
4	01												
02	01	01			100%	100%	100%	100%	100%	100%			
02	01	01	033	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	36 jenis	36 jenis	36 jenis	36 jenis	100%	36 jenis		
					Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis		
					Barang Cetak	13 jenis	7 jenis	21 jenis	21 jenis	100%	21 jenis		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD		
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jasa surat menyurat (materai, peranko, paket pengiriman)	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis			
		Kelestarian arsip inaktif biro	n/a	1000 berkas	n/a	n/a	n/a	n/a			
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	14 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	11 jenis			
		Penataan arsip inaktif biro	n/a	100cm3	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Pengelolaan naskah dinas biro	n/a	4.500 berkas	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Penggandaan	85000 lembar	100.827 lembar	80.000 lembar	80.000 lembar	100%	65.094 lembar			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung	11 tabung	11 tabung	11 tabung	100%	11 tabung			
		Penjilidan	n/a	150 buku	n/a	n/a	n/a	n/a			
		peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14 jenis	7 jenis	17 jenis	17 jenis	100%	14 jenis			
02	01	01	034	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honor pengelola	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		keuangan, pengelola barang, dan pengelola kepegawaian											
02	01	01	035	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	Makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
					Makanan dan Minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a		
					Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
					Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD		
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	01	02	01	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Sekat ruang rapat Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 87m	n/a	87 m	n/a	n/a	n/a	n/a
					Rehab ruangan untuk kelembagaan baru Biro Tata Pemerintahan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	
02	01	02	107	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan operasional roda 4 (empat) sesuai RKBMD	1 unit	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a
02	01	02	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	5 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	4 jenis
					Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	5 jenis	7 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
02	01	02	111	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan/perengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	100%	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100%	15 jenis		
02	01	02	112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) sesuai RKPBMĐ	7 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	7 unit		
					Kendaraan operasional roda 4 (empat)) sesuai RKPBMĐ	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit		
02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	01	06	016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai 70	Nilai BB	Nilai 70	Nilai 70	100%	Nilai 70		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD		
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		(LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)									
02	01	06	017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	n/a	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5,11%	n/a	n/a	n/a	n/a
				Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 bulan	n/a	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	
				Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2019	1 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2018	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Laporan Keuangan Tahun 2017	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan					
02	01	06	018	Penyusunan Rencana Progam Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	n/a	1 draft	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a		
					Materi nformasi yang sesuai dengan: Data Profil Biro Tata Pemerintahan terkini, Data SIAK DIY, informasi SKPD Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang lengkap, akurat dan terkini	1 dokumen	1 tahun	100%	100%	100%	1 tahun		
					ROPK, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku.	n/a	5 dokumen	n/a	n/a	n/a			
					Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Rencana Kerja (Renja) tahun 2019	n/a	n/a	1 dokumen.	1 dokumen.	100%			
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%			
02	01	06	019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran	n/a	Capaian kinerja pelaksana	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kas yang telah ditetapkan 6 program 18 kegiatan		kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 90%						
		Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 15 kegiatan	n/a	n/a	95 %	95 %	100%			
		Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 21 kegiatan	95%	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Kependudukan dan Catatan Sipil								
		Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	n/a	97,87%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Arah kebijakan administrasi kependudukan di DIY 2018-2022	n/a	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Dukungan penerbitan dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal.	n/a	700 akta kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Dukungan penerbitan dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal.	n/a	100 akta perkawinan	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Dukungan penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan	n/a	75 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Orang Terlantar), SKPLN (Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri) bagi TKI								
		Grand Design pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) DIY 2018-2022	n/a	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kependudukan.	n/a	3 sistem pengembangan sistem/aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Profil perkembangan kependudukan di DIY untuk RKPD 2018	n/a	1 dokumen profil	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Rumusan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan	n/a	1 dokumen rumusan	n/a	n/a	n/a	n/a		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD			
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		pencatatan sipil.		kebijakan								
		SOP pemanfaatan data kependudukan.	n/a	1 Pergub SOP Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a				
		Kependudukan Dan Pencatatan Sipil										
02	01	016	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86.1 %	n/a	80%	93.23%	1.16%	82.67%	93.23%	105.98%
02	01	016	005	Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan	Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	n/a	n/a	100 akta	210 akta	210%	n/a	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/marginal	n/a	n/a	100 akta	100 akta	100%	n/a		
		Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal	n/a	n/a	500 akta	500 akta	100%	n/a		
		Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar)	n/a	n/a	80 dokumen	80 dokumen	100%	n/a		
		Profil perkembangan kependudukan di DIY	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	n/a		
		Draf Rapergub Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Adminduk	n/a	n/a	1 Draf	1 Draf	100%	n/a		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		di DIY								
		Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	n/a	n/a	4 instansi	4 instansi	100%	n/a		
		Kerja Sama Intensif Anak di DIY	n/a	n/a	4 lembaga	4 lembaga	100%	n/a		
		Rekomendasi Penyelenggaraan Permasalahan Pencatatan Sipil	n/a	n/a	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	n/a		
		Pengembangan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan data kependudukan bagi desa	n/a	n/a	1 Sistem	1 Sistem	100%	n/a		
		Integrasi datababase kependudukan provinsi dengan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Kementerian Agama	n/a	n/a	1 Sistem	1 Sistem	100%	n/a		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
02	01	016	007	Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Buku laporan semester II 2017 dan semester I 2018	200 Buku	n/a	200 Buku	200 Buku	100%	200 Buku		
					Tersebarluasnya kebijakan adminduk melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang	7 kali	n/a	7 kali.	7 kali	100%	7 kali		
					Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga	50 Instansi/ lembaga	n/a	80 Instansi/ lembaga	80 Instansi/ lembaga	100%	50 Instansi/ lembaga		
					Distribusi blangko KTP-el di kabupaten/kota se-DIY	150.000 Keping	n/a	80000 Keping.	201500 Keping	100%	150.000 Keping		
					Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan adminduk	1 dokumen	n/a	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 dokumen		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD		
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Standardisasi perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan	n/a	n/a	1 Laporan	1 Laporan	100%	n/a			
		Meningkatnya keterampilan dan/atau pemahaman petugas pelayanan adminduk di kabupaten/kota	220 Orang	n/a	200 Orang	200 Orang	100%	220 Orang			
		Rekomendasi kebijakan percepatan penerbitan KIA	1 Rekomendasi	n/a	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi			
		Rekomendasi kebijakan percepatan penerbitan akta kelahiran dan kematian	1 Rekomendasi	n/a	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi			
02	01	016	010	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aparat kecamatan, desa, dan kabupaten yang paham atas Perda No.9 Tahun 2015 tentang	400 orang	n/a	n/a	n/a	480 orang	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak								
		Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal	500 akta	n/a	n/a	n/a	n/a	500 akta		
		Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/marginal	200 akta	n/a	n/a	n/a	n/a	200 akta		
		Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	100 akta	n/a	n/a	n/a	n/a	100 akta		
		Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan	80 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	80 dokumen		
		Lembaga yang	3 lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	3 lembaga		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY								
		Pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lintas kab/kota se-DIY	3 kali	n/a	n/a	n/a	n/a	3 kali		
02	01	016	010	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Pemberian hak akses data kependudukan kepada instansi pengguna dalam rangka percepatan pelayanan publik	3 instansi	n/a	n/a	n/a	3 instansi
					Profil perkembangan kependudukan	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	1 dokumen
					Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/kota	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	1 dokumen

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sistem informasi dalam rangka pemanfaatan data kependudukan	3 sistem	n/a	n/a	n/a	n/a	3 sistem		
		Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Koordinasi Pemberhentian, Penetapan, dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	n/a	2 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a		
02	01	072	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	n/a	100%	100%	100%	100%
02	01	72	003	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi penerapan NSPK	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	1 dokumen

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD			
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Penyelenggaraan Urusan											
		LPPD tahun 2018	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen				
		LPPD tahun 2019 dan Aplikasi LPPD	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
		Kajian kebijakan Otda	1 kajian rekomendasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 kajian rekomendasi				
		Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 rekomendasi				
		Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan				
02	01	72	004	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dan Aplikasi Naskah Perjanjian	5 naskah kerjasama	n/a	n/a	n/a	5 naskah kerjasama		
					Rekomendasi Tindak Lanjut Monev	5 rekomendasi	n/a	n/a	n/a	5 rekomendasi		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD			
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		Kerjasama Dalam Negeri						si				
		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB : Program kegiatan kerjasama SKB	n/a	n/a	n/a	n/a	2 SKB : Program kegiatan kerjasama SKB				
02	01	73	PROGRAM PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	56.25	n/a	6.12	6.12	100%	33.33	39.45	70.13
02	01	73	001	Pembinaan Aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyusunan Dokumen APBDes Propoor	n/a	n/a	3 desa	3 desa	100%	n/a	
					Penyusunan Pedoman pelaksanaan evaluasi APBDes dan Peraturan di desa	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a	
					Pemantauan Pengelolaan Dana Desa	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	n/a	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemantauan Kinerja Kecamatan	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	n/a		
		Desa dengan Perangkat BPD yang meningkat kapasitasnya dalam menyelenggarakan MUSDES	5 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	5 desa		
		Aparatur Kecamatan yang terbina sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)	3 Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Kecamatan		
		Desa dengan aparatur yang terbina dalam mengelola dokumen administrasi pemerintahan desa	5 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	5 desa		
		Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen APBDes	5 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	5 desa		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
02	01	73	002	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Laporan Hasil Pemantauan kinerja kecamatan	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan		
					Laporan Hasil Pemantauan pengelolaan dana desa 5 desa tertinggal dan 387 desa di DIY	1 rekomendasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 rekomendasi		
				Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.	n/a	82,5%	n/a	n/a	n/a	n/a		
				Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan DIY-Jateng.	n/a	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah.	n/a	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a		
		rekomen-dasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan kab/kota dan/atau antar provinsi.	n/a	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Juknis pedoman pemberian nama rupabumi unsur buatan.	n/a	1 Dokumen, 20 buku	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kab/kota DIY.	n/a	1 Dokumen, 100 buku	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Papan batas untuk penanda batas DIY- Jateng di Desa Hargomulyo dan	n/a	5 buah papan batas	n/a	n/a	n/a	n/a		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD		
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Banjaroya Kec. Kokap Kab. Kulon Progo.									
		Pilar batas yang terpelihara di Desa Hargomulyo s.d Kalirejo Kec. Kokap Kab. Kulon Progo.	n/a	40 pilar	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Pilar perapatan yang terpasang di Desa Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo s.d Desa Pondokreja, Tempel, Sleman.	n/a	16 pilar	n/a	n/a	n/a	n/a			
02	01	74	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBINAAN WILAYAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100	n/a	100	100	100	100	
04	01	56	002	Pembinaan Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Daerah	Usulan SK pemberhentian dan pengangkatan anggota	n/a	n/a	3 usulan	3 usulan	100%	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD		
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		DPRD DIY dan/ atau DPRD kab/kota untuk mendukung kelancaran									
		Monitoring pelaksanaan kebijakan Trantibum	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	n/a			
		Pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	n/a			
		Pemahaman aparatur dan anggota parpol tentang undang-undang pemilu	n/a	n/a	60 orang	60 orang	100%	n/a			
02	01	74	001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan monitoring persiapan dan pelaksanaan Pemilu kepada Menteri Dalam Negeri	1 laporan	n/a	n/a	n/a	1 laporan	
					Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum	1 laporan	n/a	n/a	n/a	1 laporan	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		terkait Ketentraman Ketertiban Umum								
		Draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan Dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 draft		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Rakyat Daerah								
		Berkas pengesahan pengangkatan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 berkas		
		Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	2 draft	n/a	n/a	n/a	n/a	2 draft		
02	01	74	002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota di DIY	1 dokumen, 100 buku		1 dokumen		
					Hasil pengukuran koordinat pilar batas wilayah DIY-Jateng secara geodetik	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	1 dokumen
					Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kesepakatan bersama pemerintah Kab / Kota tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
		Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kab/kota	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen		
		Aparatur dan masyarakat yang paham tentang Pergub No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama RUPA BUMI Unsur Buatan	225 orang	n/a	175 orang	175 orang	100%	225 orang		
		Draft Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2018)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemeliharaan papan batas untuk penanda batas DIY-Jateng	n/a	n/a	10 papan batas	10 papan batas	100%	n/a		
		Draf perjanjian kerjasama pembangunan dan pemeliharaan pilar	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari target yang telah disusun seluruhnya memenuhi target dari yang telah ditetapkan. Dari sisi indikator output (keluaran) seluruhnya memenuhi target. Tetapi apabila di lihat dari indikator inputnya dari sisi realisasi anggarannya terdapat beberapa serapan yang tidak optimal yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang tidak mempengaruhi kualitas pencapaian target. Dari target anggaran sebesar Rp. 5.954.155.842 (100%), diperoleh angka realisasi sebesar Rp. 5.678.910.427 (95,38 %). Berikut disampaikan efisiensi anggaran per sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2018:

Tabel 2.2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	109	94,10	5,90
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	100	96,93	3,07

Sumber: E-Sakip, monevapbd.jogjaprov.go.id

Berdasarkan tabel analisis efisiensi di atas dapat diketahui bahwa sasaran pertama dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan memiliki nilai efisiensi 5,90%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran ini karena penyerapan anggaran tidak optimal karena faktor eksternal yaitu pada target awal sasaran ini terdapat sebanyak 21 rumusan bahan kebijakan selama tahun 2018, namun pada anggaran perubahan 2018 menghilangkan output bidang kerjasama sebanyak 10 rumusan bahan kebijakan karena tuisi kerjasama belum berpindah ke Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 telah dihasilkan 12 dari total 11 rumusan bahan kebijakan selama tahun 2018 dengan efisiensi anggaran 5,90%.

Sedangkan indikator dari sasaran kedua dengan indikator Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK, memiliki nilai efisiensi 3,07%. Hal itu terjadi dikarenakan pada sasaran kedua, beberapa sub kegiatan penyerapan anggaran tidak optimal karena faktor eksternal. Sasaran “Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan” Telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 3,07%. Efisiensi anggaran untuk

mencapai sasaran diperoleh melalui dukungan dari Komisi A DPRD DIY terkait penambahan Anggaran APBD untuk mendukung cakupan perekaman KTP el guna menyongsong Pilpres 2019 serta terjalannya kerjasama yang baik dengan instansi terkait.

Beberapa efisiensi tersebut di atas, tidak mengganggu capaian indikator output kegiatan, sehingga capaian output tetap $\geq 100\%$ dari target yang ditentukan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur DIY dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2018 adalah : 1) Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama; dan 2) Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan; dengan target Renstra dan realisasi capaian Renstra tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2018		Realisasi Capaian Renstra Tahun 2018		% Rasio Capaian Renstra Tahun 2018	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100	Rp. 2.476.997.000	109	Rp.2.330.924.200	109	94,30
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	4	Rp. 2.224.960.639	100	Rp.2.156.612.123	100	96,93
Rata-rata Capaian							104,5	95,62

Berdasarkan capaian target kinerja di atas, selanjutnya dilakukan analisis per sasaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada Renstra Tahun 2018. Secara umum capaian renstra tahun 2018 telah memenuhi target, bahkan pada indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan melebihi target yaitu sebesar 109% dari target 100%. Berikut disampaikan evaluasi dan analisis Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2018 berdasarkan tabel di atas.

Pada sasaran kedua (Meningkatnya tertib administrasi kependudukan) mendapatkan dukungan tambahan dari Dana Alokasi Khusus sebesar anggaran Rp 1.227.772.000,00 untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sehingga total anggaran tahun 2017 (APBD+DAK) sejumlah Rp 3.452.732.639,00.

A. Sasaran Pertama : Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama

Sasaran pertama dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2018 adalah Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama. Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan.

A.1. Indikator Kinerja : Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan

Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan memiliki target kinerja dan anggaran pada Renstra tahun 2018 masing-masing sebesar 100% dan Rp 2.476.997.000,00. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2018 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 109% dan Rp. 2.330.924.200,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2018 terhadap target dan realisasi sebesar 109% kinerja dan 94,30% anggaran (Tabel 2.1).

Secara makro, performa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk mencapai indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan (dengan target 100%) berjalan optimal. Sampai dengan akhir triwulan IV TA 2018, telah dihasilkan 12 dari total 11 rumusan bahan kebijakan dalam merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, sehingga diperoleh capaian realisasi indikator sebesar 109%. Adapun rincian dari 12 rumusan bahan kebijakan tersebut di antaranya ialah :

- a. Draft NA Raperda Urusan Keistimewaan
- b. Telaah Pengelolaan Aset Bidang Kelautan dan Perikanan yang diserahkan dari Kab Bantul ke Pemda DIY
- c. Surat ke Bupati seluruh DIY tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Penyuluhan Perikanan
- d. Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Sebagai Dampak Pengalihan P3D
- e. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU.
- f. SK pemberhentian anggota DPRD dan peresmian pemberhentian antar waktu sebagai anggota DPRD

Dilihat dari sisi keuangan, sasaran pertama ini terbilang realisasinya cukup besar yaitu 94,30% jika dibandingkan dengan target awal Renstra. Walaupun begitu, bukan berarti dari sisi kinerja tidak bagus. Justru dengan pendanaan yang tidak terlalu besar, target fisik bisa terpenuhi.

Tabel 2.5. Dinamika Perencanaan pada Indikator Kinerja
 Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
 yang direspon dengan kebijakan

No.	Renstra Tahun 2018			RKA-P SKPD Tahun 2018		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran
1.	Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100%	1.330.977.900	Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100%	968.930.500
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan		1.330.977.900	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan DIY Pemerintahan		968.930.500
2.	Program Pembinaan Perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	n/a	n/a	Program Pembinaan Perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	6,12%	890.035.000
	Pembinaan Aparatur Kecamatan, DIY Desa/Kelurahan		n/a	Pembinaan Aparatur Kecamatan, DIY Desa/Kelurahan		890.035.000
3.	Program Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Wilayah	n/a	n/a	Program Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Wilayah	100%	618.031.500
	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi		n/a	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi		388.331.500
	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		n/a	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		229.700.000
JUMLAH			1.330.977.900	JUMLAH		2.476.997.000

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan pengalihan urusan kewenangan masih terdapat permasalahan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat terkait pengalihan aset Terminal A Kota Yogyakarta dan aset penyuluhan perikanan.
- 2) Adanya perangkat desa yang belum memahami tentang seluk-beluk pengelolaan keuangan desa;
- 3) Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang baru ditetapkan pada bulan April 2018 berdampak pada teknis kegiatan pendampingan APBDes Pro Poor, dari segi pedoman untuk melakukan entri pada program kegiatan berbasis pro kemiskinan (pro poor).
- 4) Terkait dengan segmen batas daerah antar kabupaten/kota lingkup DIY, untuk penggambaran peta batas daerah skala besar (1 : 5.000) saat ini belum dapat

dilaksanakan dengan optimal karena belum ada kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan di Provinsi Jawa Tengah (desa dan kabupaten). Dengan demikian peta database tersebut (tahun 2014-2018) belum dapat digunakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan KSP.

- 5) Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tentang Pergub Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pergantian Antar Waktu (PAW) Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD.
- 6) Belum adanya pedoman terkait pelaksanaan dan pelaporan evaluasi kinerja kecamatan, sehingga pemerintah kabupaten/kota belum menyampaikan laporan evaluasi kinerja kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kemudian beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut.

- 1) Data inventarisasi pengalihan P3D telah siap.
- 2) Narasumber yang kompeten sesuai bidang yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu DPPKA terkait pengelolaan keuangan desa, Biro Hukum pada teknik penyusunan produk hukum desa, Balai PMD terkait penguatan peran BPD dalam menginisiasi kebutuhan masyarakat desa melalui musyawarah desa dan Doktor dari UGM yang mengampu terkait penguatan kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kesediaan Kepala Biro untuk memberikan pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mendasarkan pada dua regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.
- 3) Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat baik Kemendagri maupun Kemendes tentang Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, regulasi Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

B. Sasaran Kedua : Meningkatkan tertib administrasi Kependudukan

Sasaran kedua dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2018 adalah Meningkatkan tertib administrasi Kependudukan. Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK.

B.1. Indikator Kinerja : Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK

Indikator Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK memiliki target kinerja dan anggaran pada tahun 2018 masing-masing sebesar 100% dan Rp. 2.224.960.639,00. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2018 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 100% dan Rp. 2.156.612.123,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2018 terhadap target dan realisasi sebesar 100% kinerja dan 96,93% anggaran (Tabel 2.1).

Tabel 2.4 Dinamika Perencanaan Program/Kegiatan Pada Indikator Kinerja Persentase Penduduk yang Ber-KTP (NIK)

No.	Renstra Tahun 2018			RKA-P SKPD Tahun 2018		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran
1.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80%	910.619.600	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80%	2.224.960.639
	a. Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		455.309.800	a. Pengembangan Sistem Informasi DIY Kependudukan		997.188.639
	b. Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		455.309.800	b. Dukungan Pelayanan Administrasi DIY Kependudukan (DAK)		1.227.772.000
	JUMLAH		910.619.600	JUMLAH		2.224.960.639

Indikator kinerja Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK mencapai angka 100%. Capaian jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK tidak terlepas dari terjalinnya kerjasama dengan baik antara Instansi terkait Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder. Angka capaian ini merupakan akumulasi dari jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK yaitu mencapai 100%. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 telah terjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan 4 (empat) organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan DIY, Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY, dan Biro Kesra Setda DIY. Capaian pelaksanaan program/kegiatan pada indikator kinerja ini sangat dipengaruhi oleh dinamika penduduk (pindah datang) dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memiliki KTP-el (tertib administrasi kependudukan). Berikut faktor penghambat dan pendukung pencapaian indikator Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)

Faktor Penghambat:

- Kepemilikan KTP-el bagi penduduk berstatus wajib KTP terkendala oleh distribusi blangko dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang masih kurang mencukupi. Akibatnya penduduk yang berhak untuk mendapatkan KTP-el sering harus menunggu beberapa hari, bahkan beberapa minggu, sebelum KTP-el mereka dicetak Dinas Dukcapil kabupaten/kota.
- Antusiasme orang tua untuk menguruskan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak mereka menyebabkan lonjakan permohonan di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, terutama di daerah yang padat penduduk seperti Sleman dan Kota Yogyakarta. Tingginya antusiasme tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan sarana prasarana seperti ketersediaan blangko dan ribbon film, alat cetak, serta personel. Akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan sampai penyerahan kepada pemohon KIA menjadi lebih lama.
- Adanya perbedaan persepsi dalam memahami beberapa kebijakan baru yang tertuang dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terutama menyangkut perlu tidaknya surat pengantar RT/RW atau desa/kelurahan. Padahal dalam Perpres tersebut tidak lagi mengatur adanya surat pengantar untuk pengurusan dokumen kependudukan. Akibatnya, penyikapan atas regulasi dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 berbeda di setiap kabupaten/kota.
- Instansi penyelenggara bidang kependudukan di tingkat provinsi maupun instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota sering kali mendapatkan permohonan akses data penduduk dari instansi vertikal. Padahal dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, menyatakan bahwa instansi vertikal hanya dapat mengajukan permohonan akses data ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Namun bila instansi di daerah tidak memberikan akses data akan menghambat pelayanan publik di daerah.

Faktor Pendukung:

- Pengajuan permohonan dan pengambilan blangko KTP-el oleh kabupaten/kota difasilitasi melalui provinsi untuk menghemat anggaran di daerah. Hampir setiap 2 kali dalam satu bulan, provinsi mengambilkan blangko ke Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mengatasi kekosongan stok di daerah.

- Untuk mengatasi lonjakan permohonan KIA, Dinas Dukcapil kabupaten/kota memberlakukan sistem kuota permohonan per hari. Selain untuk mengurangi antrean, sistem kuota bertujuan agar waktu tunggu permohonan sampai proses cetak KIA tidak terlalu lama.
- Secara bertahap Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk membahas beberapa regulasi baru yang masih multitafsir. Hal ini penting dilakukan supaya tidak ada perbedaan prosedur, persyaratan, dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan antarkabupaten/kota. Fungsi monitoring dan evaluasi provinsi atas kinerja pelayanan di kabupaten/kota juga ditingkatkan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
- Pemda DIY telah mengusulkan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri agar dilakukan revisi atas Permendagri Nomor 61 Tahun 2015. Hal-hal yang perlu direvisi antara lain ruang lingkup instansi pengguna, skala data yang digunakan agar dimungkinkan menggunakan skala nasional, serta penyederhanaan prosedur dan tata cara perizinan. Selain dalam bentuk pemberian rekomendasi, Pemda DIY telah memberikan akses bagi instansi pengguna di tingkat kabupaten/kota untuk memanfaatkan data skala provinsi dalam rangka efektivitas dan kemudahan pelayanan publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2015, Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kependudukan. Dengan demikian Biro Tata Pemerintahan mengampu 2 urusan yakni urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.

2.2.1 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan (adminduk) di DIY pada 2018 terbagi dalam tiga dimensi, yang menggambarkan titik berat kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan stakeholders. Dimensi pertama, yakni penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana adminduk yang berdampak langsung terhadap kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan. Terlebih dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengamanatkan instansi pelaksana untuk melakukan penyesuaian SOP secara tepat dan cepat. Dimensi ini dilakukan dengan: *pertama*, memastikan bahwa seluruh instansi pelaksana menerapkan pemangkasan alur birokrasi permohonan akta-akta dan dokumen pindah penduduk tanpa melalui desa/kelurahan. *Kedua*, memperkuat peran provinsi dalam rangka membantu distribusi blangko KTP-el dari Kemendagri ke kabupaten/kota. Selama 2018, sebanyak 205.000 keping blangko diperoleh dari Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pencetakan di kabupaten/kota.

Inovasi percepatan pelayanan publik juga dilakukan dengan implementasi penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) *online* bagi TKI asal DIY yang akan bekerja di luar negeri mulai Agustus 2017. Melalui program tersebut pemohon (calon TKI) dapat mengajukan permohonan melalui website khusus dan pengambilan SKPLN akan dilayani di kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) BP3TKI Yogyakarta, bersamaan dengan pengurusan perizinan lainnya. Selain memangkas birokrasi secara signifikan, program SKPLN *online* mendorong adanya koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan BP3TKI Yogyakarta. Di tingkat nasional, DIY merupakan satu-satunya provinsi yang mampu mengoordinasikan penerapan penerbitan SKPLN secara *online* yang berlaku untuk semua kabupaten/kotanya.

Dimensi kedua adalah pendayagunaan data kependudukan untuk mendukung kebutuhan data bagi instansi lintas sektor sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan akses kepada instansi atau lembaga swasta yang memerlukan data kependudukan dalam rangka percepatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, alokasi bantuan sosial, alokasi anggaran, dan penyelenggaraan demokrasi. Selama 2018 Pemda DIY telah membantu KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dengan memberikan akses terbatas ke database kependudukan, membantu Polda DIY untuk melakukan pemeriksaan dokumen kependudukan calon anggota Polri, menyediakan akses data kependudukan bagi kepolisian dalam rangka pemeriksaan identitas pemilik kendaraan bermotor, serta menyediakan sistem informasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi penerimaan siswa baru tingkat SMA. Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan akan terus

dilakukan untuk mendukung pelayanan publik di DIY yang terintegrasi, cepat, dan mudah sebagaimana visi *Jogja Smart Province*.

Dimensi ketiga, yaitu pencapaian target daerah terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran anak usia di bawah 18 tahun, dan akta kematian). Pada 2018, Pemda DIY menargetkan 80% penduduk DIY telah memiliki dokumen penting administrasi kependudukan. Realisasinya, dari target tersebut hingga akhir Desember 2018 persentase kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan mencapai 84,95% atau sebesar 106,19% terhadap target 2018.

Secara rinci jumlah penduduk wajib KTP di DIY sampai dengan Desember 2018 berdasarkan database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kabupaten/Kota adalah 2.763.181 orang. Dari jumlah tersebut, 98,75% atau sebanyak 2.728.559 orang telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di database KTP-el. Bila dipilah per kabupaten/ kota, Yogyakarta menempati posisi tertinggi dalam angka perekaman biometrik dan kepemilikan KTP-el, yaitu 99,31%, diikuti kabupaten Bantul 99,26%, Kabupaten Sleman 98,63%, Kabupaten Gunungkidul 98,38%, dan terendah Kabupaten Kulon Progo 98,09%.

Meski angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di DIY telah melampaui target RPJMD, masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 34.626 orang atau 1,25% dari total wajib KTP. Penduduk yang belum melakukan perekaman karena alasan tinggal sementara di luar DIY, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor ke Dinas Dukcapil.

Pencapaian DIY atas kepemilikan akta kelahiran anak sampai akhir 2018 tercatat 93,61%. Bila dipilah tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Kulon Progo memiliki capaian akta kelahiran anak tertinggi dengan angka 97,98%, diikuti Kabupaten Bantul 96,53%, Kota Yogyakarta 95,18%, Kabupaten Gunungkidul 91,86%, dan terendah kabupaten Sleman 89,78%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran, antara lain konversi database kelahiran non-SIAK ke database SIAK; kerja sama dengan puskesmas, bidan, dan rumah sakit dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran; mewajibkan penduduk datang untuk melampirkan akta kelahiran; membebaskan sanksi denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran bagi penduduk dari keluarga miskin; dan pendataan penduduk secara berkala.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	-	80	84,95	106,19	92	92,34

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2018 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	n/a	n/a	97%	n/a	n/a	n/a	97,87%	n/a	n/a	n/a	-
	Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)				80				84,95			
2.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan	n/a	n/a	80%	n/a	n/a	n/a	82,5%	n/a	n/a	n/a	-

2.2.2 Urusan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah DIY, telah ditetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan urusan pemerintahan di DIY juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski demikian pelaksanaan urusan keistimewaan DIY belum diatur di dalam Perda 3 Tahun 2017 dan diatur dalam Perdas Pelaksanaan Urusan Keistimewaan.

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan fasilitasi peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW), yaitu dengan diterbitkan 9 (sembilan) SK pemberhentian anggota DPRD dan peresmian pemberhentian antar waktu sebagai anggota.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan pendampingan di 4 (empat) desa yaitu Desa Pucanganom Kecamatan Rongkop, Desa Hargotirto Kecamatan Kokap, Desa Ngestiharjo Kecamatan Wates, dan Desa Serut Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dilakukan supaya perencanaan, penggunaan, pelaporan dan akuntabilitas dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kerjasama antar-daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah menerbitkan draft NA Raperda Urusan Keistimewaan, Telaah Pengelolaan Aset Bidang Kelautan dan Perikanan yang diserahkan dari Kabupaten Bantul ke Pemda DIY, surat ke Bupati seluruh DIY tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Penyuluhan Perikanan, Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Sebagai Dampak Pengalihan P3D, Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU. Pada triwulan 4, terdapat Perubahan DPA yang mengeliminasi target subkegiatan kerjasama sejumlah 10 target.

Pada tahun 2018, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melalui Bagian Pemerintahan Umum, Sub Bagian Penataan Wilayah, melaksanakan kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi (program Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah). Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi memiliki 7 (tujuh) keluaran, yang secara garis besar dibedakan sebagai berikut.

- a. Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi
 - 1) Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY;
 - 2) Pemahaman aparatur dan masyarakat tentang Pergub 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan.
- b. Penataan Wilayah Perbatasan
 - 1) Pengukuran titik koordinat pilar batas wilayah DIY-Jawa Tengah secara geodetik;
 - 2) Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah;
 - 3) Pemeliharaan papan batas untuk penanda batas DIY-Jawa Tengah;
 - 4) Penyelesaian permasalahan perbatasan Kabupaten/Kota dan/atau antar provinsi;
 - 5) Draf perjanjian kerjasama pembangunan dan pemeliharaan pilar

Berikutnya pembinaan perbatasan antar-daerah dilaksanakan melalui koordinasi rutin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten yang berbatasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta koordinasi internal antara Pemda DIY dengan pemerintah Kabupaten/Kota di DIY, dengan hasil berupa :

1. fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan;
2. pemeliharaan dan pemasangan pilar batas DIY-Jateng;
3. pemasangan papan batas wilayah;
4. penyusunan *database* pilar batas antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo;
5. dokumen arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan DIY-Jawa Tengah bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur (ke-PU-an).

Pada Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum memiliki indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan. Dengan Formulasi Perhitungan Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun berjalan dibagi jumlah dinamika pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun berjalan x 100 (tahunan). apabila diformulasikan ke rumus indikator tersebut, 12 rumusan bahan kebijakan dibagi 11 dikali 100% dan dihasilkan angka capaian 109%, yang mana jumlah ini melebihi 9% dari yang sudah ditargetkan (target 100%). Pada target awal sasaran ini terdapat sebanyak 21 rumusan bahan kebijakan selama tahun 2018, namun pada anggaran perubahan 2018 menghilangkan output bidang kerjasama sebanyak 10 rumusan bahan kebijakan karena tusi kerjasama belum berpindah ke Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 telah dihasilkan 12 dari total 11 rumusan bahan kebijakan selama tahun 2018

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi

Tugas

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Fungsi

Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
- f. fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- g. fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;
- h. perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan;
- k. penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
- l. fasilitasi dan pengoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;
- m. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- n. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi Daerah;
- o. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
- q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Berikut adalah beberapa isu strategis yang dilakukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.
 - a. Harmonisasi hubungan antar pemerintah daerah sangat berkaitan erat dengan pengelolaan dan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar pemerintah daerah. Disamping itu peningkatan kerjasama antar daerah juga dapat seiring sejalan dengan terselesaikannya permasalahan di wilayah perbatasan tersebut.
 - b. Upaya-upaya penegasan batas wilayah diantaranya melalui pemeliharaan pilar dan papan batas serta pemahaman/sosialisasi tentang Permendagri yang mengatur tentang batas wilayah sehingga aparat maupun masyarakat paham mengenai batas wilayah perbatasan secara administratif, bukan yang ditandai dengan kenampakan alam saja.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat maupun pemerintah-pemerintah kabupaten/kota.
 - a. Koordinasi, konsultasi mengenai ruang lingkup penyelenggaraan urusan (melalui NSPK) dengan pemerintah pusat untuk disosiasikan ke pemerintah daerah agar adanya kejelasan mengenai batasan ruang lingkup rincian urusan pemerintahan. Namun untuk urusan sub bidang urusan yang belum ada NSPKnya, pelaksanaan menjadi urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
 - b. Tidak diaturnya ketentuan yang mengatur anggota DPRD kab/kota maupun provinsi yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum maupun khusus dalam hal keuangan, dalam masa tenggang menunggu keluarnya keputusan pemberhentian sementara baik dari Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri. Sehingga perlu penyamaan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam pidana khusus dan yang mengundurkan diri termasuk hak keuangannya.
 - c. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota belum dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Dalam kegiatan pengalihan P3D terutama bidang PU, kewenangan pengalihan aset bersumber dari APBN merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Pengembangan sistem informasi dan database pemerintahan berbasis IT. Tuntutan pembangunan database pemerintahan berbasis teknologi informasi menjadi hal yang harus segera kita jawab dalam era global ini. Dengan demikian maka adopsi dan

pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus semakin ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan tepat.

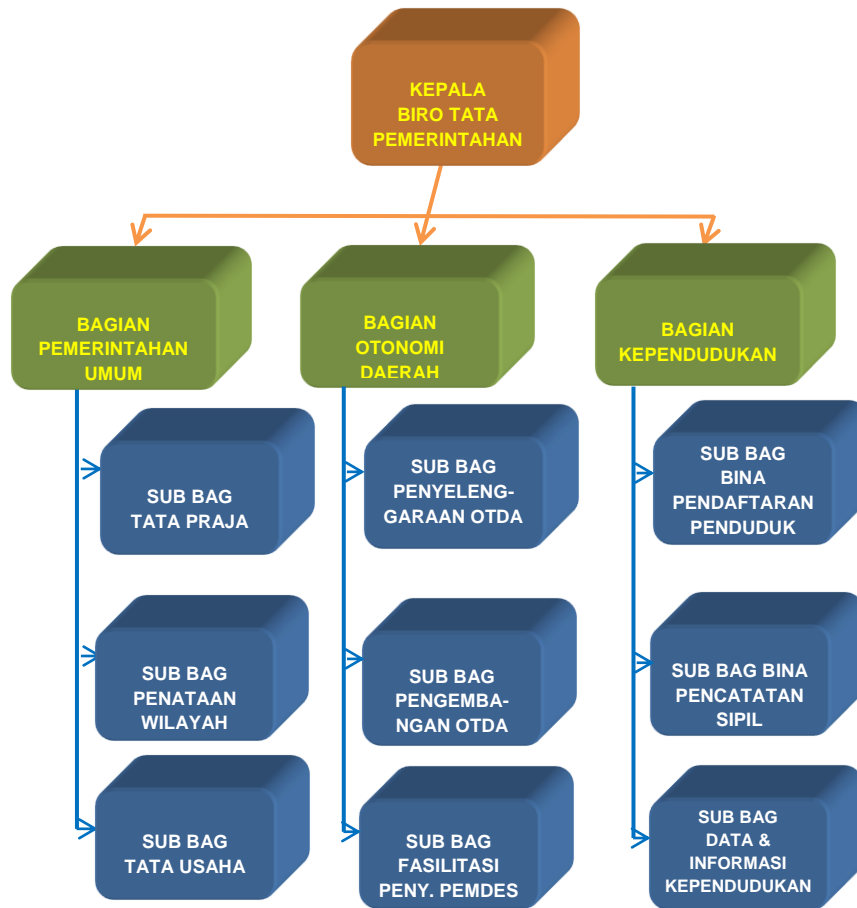
- a. Peningkatan pelayanan bidang kependudukan
Kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin masih rendah. Berdasarkan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) masih terdapat instansi atau lembaga swasta layanan publik belum melaksanakan tertib administrasi kependudukan, misal: masih dapat berlakunya surat keterangan kelahiran atau kematian dari desa/ kelurahan padahal semestinya menggunakan akta kelahiran atau akta kematian. Sementara itu, masih terdapat pemberlakuan surat keterangan domisili padahal semestinya sudah menggunakan KTP.
 - b. Melakukan sosialisasi dengan berbagai macam media untuk meningkatkan jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el untuk melakukan perekaman.
 - c. Aksesibilitas masyarakat tentang data di bidang kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - d. Kesadaran penduduk untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang. Padahal hal ini berpengaruh pada akurasi dan kemutakhiran data kependudukan.
4. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
- a. Berkaitan dengan pengalihan urusan kewenangan masih terdapat permasalahan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat terkait pengalihan aset Terminal A Kota Yogyakarta dan aset penyuluhan perikanan.
 - b. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang baru ditetapkan pada bulan April 2018 berdampak pada teknis kegiatan pendampingan APBDes Pro Poor, dari segi pedoman untuk melakukan entri pada program kegiatan berbasis pro kemiskinan (*pro poor*).
 - c. Terkait dengan segmen batas daerah antar kabupaten/kota lingkup DIY, untuk penggambaran peta batas daerah skala besar besar (1 : 5.000) saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena belum ada kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan di Provinsi Jawa Tengah (desa dan kabupaten). Dengan demikian peta

database tersebut (tahun 2014-2018) belum dapat digunakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan KSP.

- d. Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tentang Pergub Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pergantian Antar Waktu (PAW) Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD.
- e. Kepemilikan KTP-el bagi penduduk berstatus wajib KTP terkendala oleh distribusi blangko dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang masih kurang mencukupi. Pada tahun 2018, total blangko yang diperoleh dari Kemendagri sebanyak 205.000 keping yang diterima oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Namun kebutuhan blangko untuk pelayanan kepada penduduk masih jauh dari cukup. Hal ini menyebabkan sebagian penduduk belum dapat menerima fisik KTP-el.
- f. Antusiasme orang tua untuk menguruskan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak mereka menyebabkan lonjakan permohonan di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, terutama di daerah yang padat penduduk seperti Sleman dan Kota Yogyakarta. Tingginya antusiasme tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan sarana prasarana seperti ketersediaan blangko dan ribbon film, alat cetak, serta personel. Akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan sampai penyerahan kepada pemohon KIA menjadi lebih lama.
- g. Adanya perbedaan persepsi dalam memahami beberapa kebijakan baru yang tertuang dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terutama menyangkut perlu tidaknya surat pengantar RT/RW atau desa/kelurahan. Padahal dalam Perpres tersebut tidak lagi mengatur adanya surat pengantar untuk pengurusan dokumen kependudukan. Akibatnya, penyikapan atas regulasi dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 berbeda di setiap kabupaten/kota.
- h. Instansi penyelenggara bidang kependudukan di tingkat provinsi maupun instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota sering kali mendapatkan permohonan akses data penduduk dari instansi vertikal. Padahal dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, menyatakan bahwa instansi vertikal hanya dapat mengajukan permohonan akses data ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Namun bila instansi di daerah tidak memberikan akses data akan menghambat pelayanan publik di daerah.

- i. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- j. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY**



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal (Ranwal) RKPD Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang terdapat dalam Buku Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2020 hanya tercantum sampai pada level program.

Biro Tata Pemerintahan pada Ranwal RKPD 2020 merencanakan 3 program kesekretariatan; Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dan 4 program non kesekretariatan, diantaranya; Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah, Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama, Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan dan Program Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Tabel 2.7. Rencana Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	10 perangkat daerah

Untuk tahun 2020 Biro Tata Pemerintahan merancang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator rencana kinerja tahunan di atas. Berikut disampaikan secara singkat review program yang ada di dokumen Rancangan Awal RKPD 2020 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Tabel 2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Lembar : 1

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Administrasi Perkantoran	DIY	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	876.445.350	Program Administrasi Perkantoran	DIY	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	890.000.000	
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	DIY	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	503.652.215	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	DIY	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	670.000.000	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	138.696.250	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	156.000.000	
4.	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	DIY	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	1.420.000.000	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	DIY	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	1.700.000.000	
5.	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	DIY	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	33,33%	1.080.000.000	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	DIY	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	33,33%	1.150.000.000	
6.	Program	DIY	Persentase rumusan bahan	100%	1.250.000.000	Program	DIY	Persentase rumusan	100%	1.200.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah		kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah			Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah		bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah			
7	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86.10%	1.000.000.000	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	82.67%	1.700.000.000	
	Jumlah				6.268.793.815					7.466.000.000	

Dari rancangan awal program Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang ada di Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2020 sebesar Rp. 6.268.793.815,00 Sedangkan setelah dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi (*existing*) saat ini, anggaran Biro Tata Pemerintahan bertambah menjadi Rp. 7.466.000.000,00 atau ada penambahan sekitar Rp. 1.197.206.185,00. Penambahan tersebut disebabkan adanya penambahan dan/atau perubahan keluaran/ouput kegiatan. Hal tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika dalam pemerintahan dan kelembagaan yang harus segera disikapi dan direspon dalam proses perencanaan dan penganggaran demi penyelenggaraan tata pemerintahan yang optimal responsivitasnya.

**Tabel 2.9. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2020
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sedangkan mengenai usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2020 secara resmi tidak ada. Biro Tata Pemerintahan di Tahun 2020 ini memiliki kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat marginal, yaitu dengan Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, melalui kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari kegiatan tersebut, ada beberapa keluaran (output) yang menasar pada kelompok masyarakat marginal (miskin), diantaranya; Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal (100 akta), Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal (500 akta), Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal (200 akta), dan Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan(Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar) (sebanyak 80 dokumen)). Selain kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat miskin (marginal) tersebut, ada juga kegiatan yang secara tidak langsung berpihak pada pengentasan kemiskinan yaitu pada Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan melalui Kegiatan Pembinaan Aparatur Desa/ Kelurahan, dan Kecamatan, terkhusus pada keluaran (output) Pendampingan penyusunan dokumen APBDes *Pro Poor* dengan target 5 desa berkembang sesuai hasil kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY, serta pemantauan pengelolaan dana desa untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa yang selalu menjadi fokus perhatian banyak pihak.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan peralihan antara periode RPJMD 2012 – 2017 dan RPJMD 2017 – 2022. Sebagai tahapan tahun kedua RPJMD 2017 – 2022, penyusunan RKPD tahun 2020 dilaksanakan dengan mengakomodir upaya penyelarasan materi awal RPJMD 2017 – 2022 dengan menyesuaikan konten RKPD tahun 2020 dengan dokumen *background study* RPJMD terkait. Penyelarasan ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselarasan RKPD tahun 2020 dengan calon dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dijabarkan.

RPJMD DIY 2017-2022 berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dimana penekanan pada RPJMD DIY 2017-2022 adalah pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta serta penguatan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis pada sumber daya lokal dan didukung oleh harmonisasi bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penekanan pada RPJMD DIY 2017-2022 ini telah selaras dengan visi RPJMN untuk memberdayakan sumberdaya manusia yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dalam hal menciptakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pemberdayaan sumber daya manusia ke arah Kesejahteraan Rakyat.

RPJMD DIY 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur DIY yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD DIY 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. Selanjutnya RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman bagi RPJMD DIY 2017-2022 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Melalui penyelarasan antara RPJMD DIY dengan RPJMN tersebut, diharapkan dapat terwujud capaian dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagai upaya sinergi antara pusat dan daerah serta antar wilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan.

Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*. Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilaksanakan dengan:

- 1) Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah
- 2) Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- 3) Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 4) Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 5) Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dan
- 6) Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah

Selain pada RPJMN 2015-2019, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 juga berpedoman pada RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025. RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta menjabarkan kehendak masyarakat DIY yang dijadikan pedoman dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Visi RPJMD DIY pada periode 2017-2022 mengambil Tema:

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022. Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam **“Lima Kemuliaan”** atau **“Panca Mulia”** yakni:

- 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
- 2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
- 3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
- 4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan

- 5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan untuk Misi RPJMD DIY 2017-2022 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendukung tercapainya misi kedua dari RPJMD DIY 2018-2022 yaitu; ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis***; dimana rumusan misi ini meringkas Panca Mulia (lima kemuliaan) 4, dan 5. Dari Misi tersebut, ditetapkanlah tujuan Biro Tata Pemerintahan, yang diharapkan akan tercapai di 2020 nanti yaitu; ***Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada visi dan misi DIY 2017-2022, maka selanjutnya Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Rumusan tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2017-2022 dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan DIY, yaitu optimalnya responsivitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Terdapat dua sasaran pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2017-2022, yaitu:

1. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.

2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Maka berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, berikut disajikan table tujuan dan sasaran pembangunan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2017-2022:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	4	7	10	13	15

Tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu *Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Sedangkan untuk sasaran strategisnya ada 2 (dua) diantaranya; 1). Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama, dengan indikator: Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan (target 100%), 2). Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dengan indikator: Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK (target 10 instansi).

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	100%	Rp. 890,000,000.00	APBD		100%	Rp. 795,000,000.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	36 jenis	Rp 295,000,000.00	APBD		36 jenis	Rp 300,000,000.00
		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	2 jenis		APBD		2 jenis	
		Barang cetakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	13 jenis		APBD		13 jenis	
		Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda empat	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	5 unit		APBD		5 unit	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda dua	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	7 unit		APBD		7 unit	
		Jasa surat-menyurat	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	3 jenis		APBD		3 jenis	
		Komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	11 jenis		APBD		11 jenis	
		Penggandaan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	85000 lembar		APBD		85000 lembar	
		Pengisian tabung pemadam	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	11 tabung		APBD		11 tabung	
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	14 jenis		APBD		14 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 9 orang pengelola keuangan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 tahun	Rp 45,000,000.00	APBD		1 tahun	Rp 45,000,000.00
		Kinerja 2 orang pengelola barang	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 tahun		APBD		1 tahun	
		Kinerja 1 orang fasilitasi kepegawaian	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 tahun		APBD		1 tahun	
	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 tahun	Rp 550,000,000.00	APBD		1 tahun	Rp 450,000,000.00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Konsultasi dan koordinasi luar daerah	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 tahun		APBD		1 tahun	
		3. Makanan dan minuman rapat	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 tahun		APBD		1 tahun	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	100%	Rp. 670.000.000,00	APBD		100%	Rp. 370.000.000,00
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan sesuai RKBMD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	5 jenis	Rp 150,000,000.00	APBD		5 jenis	Rp 150,000,000.00
		Perlengkapan sesuai RKBMD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	5 jenis		APBD		5 jenis	
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya peralatan/ perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMMD	DIY	100%	Rp 70,000,000.00	APBD		100%	Rp 70,000,000.00
	Kegiatan Pengadaan / Rehabilitasi Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan dinas/ operasional roda 4 (empat)	DIY	1 unit	Rp 300,000,000.00	APBD		n/a	n/a
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua sesuai RKPBMMD	DIY	7 unit	Rp 150,000,000.00	APBD		7 unit	Rp 117,000,000.00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat sesuai RKPBMMD	DIY	5 unit		APBD		5 unit	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	100%	Rp. 146.000.000	APBD		100%	Rp. 146.000.000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Nilai 70	Rp 10,000,000.00	APBD		Nilai 70	Rp 10,000,000.00
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Tahunan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 laporan	Rp 6,000,000.00	APBD		1 laporan	Rp 6,000,000.00
		Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	12 bulan		APBD		12 bulan	
		Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2019	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 laporan		APBD		1 laporan	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 dokumen	Rp 130,000,000.00	APBD		1 dokumen	Rp 130,000,000.00
		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
		Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
		Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Tata Pemerintahan Setda yang lengkap dan terkini	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 21 kegiatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	95%	Rp 10,000,000.00	APBD		95%	Rp 10,000,000.00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	DIY	100%	Rp 1,700,000,000.00	APBD		100%	Rp 1,725,000,000.00
	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	LPPD tahun 2019 dan Aplikasi LPPD	DIY dan Kab/Kota	1 dokumen	Rp 1,100,000,000.00	APBD		1 dokumen	Rp 1,100,000,000.00
		Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	DIY dan Kab/Kota	1 rekomendasi tentang penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan		APBD		1 rekomendasi tentang penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan	
		Kajian kebijakan Otda	DIY	1 kajian rekomendasi		APBD		1 kajian rekomendasi	
		Rekomendasi penerapan NSPK	DIY dan Kab/Kota	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
	Kegiatan Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dan Aplikasi Naskah Perjanjian	DIY dan Kab/Kota	5 naskah kerjasama	Rp 600,000,000.00	APBD		5 naskah kerjasama	Rp 625,000,000.00
		Rekomendasi Tindak Lanjut Monev Kerjasama Dalam Negeri	DIY dan Kab/Kota	5 rekomendasi		APBD		5 rekomendasi	
		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	DIY	2 SKB : Program kegiatan kerjasama SKB		APBD		2 SKB : Program kegiatan kerjasama SKB	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Desa Tertinggal Yang Memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	DIY	51,02%	Rp. 1.150.000.000,00	APBD		75,51%	Rp. 1.150.000.000,00
	Kegiatan Pembinaan Aparatur Desa/ Kelurahan, dan Kecamatan	" Desa dengan Perangkat BPD yang meningkat kapasitasnya dalam menyelenggarakan MUSDES "	DIY	5 desa berkembang sesuai hasil kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY	Rp 850,000,000.00	APBD		5 desa berkembang sesuai hasil kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY	Rp 850,000,000.00
		Aparatur Kecamatan yang terbina sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)	DIY	3 Kecamatan		APBD		3 Kecamatan	
		Desa dengan aparatur yang terbina dalam mengelola dokumen administrasi pemerintahan desa	DIY	5 desa berkembang sesuai hasil kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY		APBD	-	5 desa berkembang sesuai hasil kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY	
		Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen APBDes	DIY	5 desa berkembang sesuai hasil kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY		APBD		5 desa berkembang sesuai hasil kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Laporan Hasil Pemantauan kinerja kecamatan	DIY	1 Laporan	Rp 300,000,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 300,000,000.00
		Laporan Hasil Pemantauan pengelolaan dana desa 5 desa tertinggal dan 387 desa di DIY	DIY	1 rekomendasi		APBD		1 rekomendasi	
	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran anak, akta kematian)	DIY	86.1 %	Rp. 1,700,000,000.00	APBD		87.17%	Rp. 1,900,000,000.00
	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aparat kecamatan, desa, dan kabupaten yang paham atas Perda No.9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	DIY	400 orang	Rp 1,200,000,000.00	APBD		400 orang	Rp 1,200,000,000.00
		Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal	DIY	500 akta		APBD		500 akta	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/marginal	DIY	200 akta		APBD		200 akta	
		Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	DIY	100 akta		APBD		100 akta	
		Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan	DIY	80 dokumen		APBD		80 dokumen	
		Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	DIY	3 lembaga		APBD		3 lembaga	
		Pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lintas kab/kota se-DIY	DIY	3 kali di Bulan Februari, Maret, dan Agustus		APBD		3 kali di Bulan Februari, Maret, dan Agustus	
	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/kota	DIY	1 dokumen	Rp 500,000,000.00	APBD		1 dokumen	Rp 700,000,000.00
		Pemberian hak akses data kependudukan kepada instansi pengguna dalam rangka percepatan pelayanan publik	DIY	3 instansi		APBD		3 instansi	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Profil perkembangan kependudukan	DIY	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
		Sistem informasi dalam rangka pemanfaatan data kependudukan	DIY	3 sistem		APBD		3 sistem	
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	DIY	100%	Rp. 1.200.000.000,00	APBD		100%	Rp. 1.200.000.000,00
	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	DIY	2 usulan/draf SK	Rp 500,000,000.00	APBD		2 usulan/draf SK	Rp 500,000,000.00
		Laporan monitoring persiapan dan pelaksanaan Pilkada kepada Menteri Dalam Negeri	DIY	1 laporan		APBD		1 laporan	
		Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait Ketentraman Ketertiban Umum	DIY	1 laporan		APBD		1 laporan	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Aparatur dan masyarakat yang paham tentang Pergub No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama RUPA BUMI Unsur Buatan	DIY	225 orang dari komponen Perwakilan Desa, Perwakilan Kecamatan, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/ Kota,	Rp 700,000,000.00	APBD		225 orang dari komponen Perwakilan Desa, Perwakilan Kecamatan, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/ Kota,	Rp 700,000,000.00
		Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	Perbatasan DIY-Jateng	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
		Draft Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Perbatasan DIY-Jateng	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
		Hasil pengukuran koordinat pilar batas wilayah DIY-Jateng secara geodetik	DIY/Jateng	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
		Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kab/kota	DIY dan Kab/Kota	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
		Kesepakatan bersama pemerintah Kab / Kota tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan	DIY dan Kab/Kota, Jateng	1 Dokumen kesepakatan bersama		APBD		1 Dokumen kesepakatan bersama	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi							
		Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota di DIY	DIY	dokumen, 100 buku untuk OPD Pemda DIY, Kabupaten (Bappeda, Bagian Pemerintaha), Kemendagri, DPRD DIY, DPD RI Perwakilan DIY		APBD		dokumen, 100 buku untuk OPD Pemda DIY, Kabupaten (Bappeda, Bagian Pemerintaha), Kemendagri, DPRD DIY, DPD RI Perwakilan DIY	

Biro Tata Pemerintahan Tahun 2020 merencanakan anggaran sebesar Rp 7.466,000.000,00 untuk melaksanakan sebanyak 7 program dan 19 kegiatan. Se jauh ini dinamika yang terjadi sudah disikapi ke dalam perencanaan program dan anggaran. Dengan disahkannya Perda Istimewa Provinsi DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, diharapkan dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat direspon dengan baik.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan dokumen tahunan yang berpedoman pada dokumen renstra perangkat daerah, dan mengacu pada RKPD daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 nanti, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan melaksanakan 7 program dan 19 kegiatan. Keseluruhan rencananya akan dibiayai dengan skema anggaran APBD. Lebih jelasnya berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 yang akan dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya.

Tabel 4.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	10 perangkat daerah

Disamping skema penganggaran APBD, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY semenjak 2 Tahun 2017 menerima kegiatan dengan skema pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Secara mendetail belum bisa disampaikan, karena kegiatan beserta angka nominal anggarannya merupakan pemberian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memiliki petunjuk teknis pelaksanaan secara tersendiri, meskipun dalam pengelolaannya nanti diperlakukan sama dengan kegiatan dengan skema APBD.

BAB 5 PENUTUP

Rancangan Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada rancangan awal RKPD. Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN yang saat ini masih dalam proses penyusunan naskah Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Sehingga Rancangan Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD 2020.

Rancangan Renja 2020 ini merupakan gambaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Rancangan Renja 2020 diharapkan dapat memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; menyediakan acuan resmi bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD; memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program-program operasional tahunan; serta sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Rancangan Renja Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015, serta sejumlah peraturan perundangan nasional, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan beberapa peraturan-perundangan tersebut di atas, terdapat sejumlah momen penting yang perlu diperhatikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2020 dan 2021, yang bisa mempengaruhi langkah Biro Tata Pemerintahan kedepannya. Sejumlah momen penting dimaksud adalah :

1. Penyusunan Dokumen RPJMD DIY Tahun 2020-2024;
2. Pelaksanaan beberapa kebijakan bidang Kependudukan, misalnya kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) dan percepatan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

Pada tahun anggaran 2020, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mengusulkan 7 Program dan 19 kegiatan yang kegiatan yang dibiayai APBD dengan Penganggaran sebesar Rp. Rp 7.466.,000.000,00. Di antara ketujuh program tersebut terdapat 1 (satu) program unggulan karena bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat, yakni Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dimana dalam indikator keluaran/outputnya langsung berhadapan dengan masyarakat miskin/marginal, yaitu berupa fasilitasi kepemilikan akta lahir anak, akta perkawinan maupun akta kematian bagi warga miskin/marginal serta fasilitasi kepemilikan dokumen penting (KK, KTP, Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)) bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pada akhirnya, dalam mencapai target program dan kegiatan di Tahun 2020 nantinya, Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY.